



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Senin

Tanggal: 30 Agustus 2021

Halaman: 2

SEKTOR PENGGERAK EKONOMI TERDAMPAK PANDEMI Target Pendapatan Diturunkan 4,12 Persen

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya bersikap realistis terkait rancangan APBD perubahan 2021. Salah satunya menyesuaikan target pendapatan dengan menurunkan hingga 4,12 persen dari rencana sebelumnya.

Menurut Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, penurunan target pendapatan tersebut tidak bisa terelakkan seiring kebijakan PPKM mulai 3 Juli lalu. "Perekonomian Kota Yogya sebagai kota pariwisata tumbuh seiring kunjungan wisatawan. Meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia hingga berlakunya PPKM di berbagai daerah termasuk DIY turut berdampak pada kunjungan wisatawan yang menurun drastis sehingga laju perekonomian Kota Yogya melambat," urainya, Minggu (29/8).

Semula target pendapatan daerah ditetapkan Rp 1,678 triliun.

Sedangkan dalam rancangan APBD perubahan turun menjadi Rp 1,610 triliun. Asumsi penurunan paling tinggi berada di pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperkirakan turun hingga Rp 59,5 miliar. Kemudian transfer dari pemerintah pusat juga diprediksi turun hingga Rp 22,9 miliar, terutama dari pos Dana Alokasi Umum (DAU).

Sikap realistis tersebut harus diambil guna menjaga stabilitas neraca keuangan pemerintah daerah. Meski demikian terdapat beberapa pos pendapatan yang justru berpotensi meningkat. Di antaranya menyangkut hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan, diprediksi meningkat Rp 2,7 miliar. Begitu pula transfer antar daerah ditargetkan meningkat Rp 13,1 miliar.

"Sampai triwulan ketiga ini PAD masih belum menunjukkan capaian yang optimal karena kondisi ekonomi memang belum stabil. Tetapi kita berasumsi pada Oktober, November dan Desember itu pendapatan akan lebih baik," imbuh Heroe.

Di sisi lain, meski target pendapatan harus diturunkan namun target belanja justru ditingkatkan. Alokasi belanja daerah naik sebesar Rp 172,7 miliar atau 9,74 persen dari sebelumnya. Peningkatan pos belanja tersebut merupakan bagian dari kebijakan fiskal sebagai salah satu wujud intervensi pemerintah di dalam sektor perekonomian.

Oleh karena itu Heroe berharap kenaikan alokasi belanja dalam APBD perubahan mampu menjadi stimulus dalam upaya menggerakkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Keputusan menurunkan target pendapatan yang dibarengi dengan menaikkan pos belanja juga bukan perkara mudah.

"Kenapa belanja harus dinaikkan, karena memang masyarakat masih perlu dibantu dan ekonomi perlu difasilitasi untuk meningkat. Efortnya ini luar biasa," urainya.

Disparitas antara penurunan target pendapatan dan kenaikan pos belanja tersebut diimbangi dengan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun 2020 lalu. Dengan demikian, defisit anggaran mampu dijaga.

(Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	
1.	☐ Negatif	☐ Ama
2.	☐ Positif	☐ Sege
3.	☐ Netral	☐ Bias
4.		
5.		

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Perekonomian Pengemb. P	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005